

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
URAY DANI ADHANI
NIM. E42012016

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : d.uray@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun Peraturan Desa serta mengawasi Kinerja Perangkat Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan mengenai kinerja BPD yang dinilai kurang maksimal dikarenakan belum adanya Peraturan Desa yang dibuat BPD selain tentang Tata Tertib BPD serta aspirasi masyarakat desa yang kurang ditindak lanjuti oleh BPD. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Tumuk Manggis Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja BPD tersebut yaitu Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas menurut Moehariono. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Tumuk Manggis belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyusunan Peraturan Desa sehingga BPD belum maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa.

Kata-kata Kunci : Kinerja BPD, Peraturan Desa, Aspirasi Masyarakat.

VILLAGE CONSULTATIVE BODY PERFORMANCE IN IMPLEMENTATION OF VILLAGE ADMINISTRATION IN TUMUK MANGGIS VILLAGE, SAMBAS SUB DISTRICT, SAMBAS REGENCY

Abstract

This study intended to describe and analyze the performance of Village Consultative Body in carrying out their duties dan functions in channeling the aspirations of community, compose the village's regulation, and controlled the Village performances. The title of this thesis are appointed based on the problem concerning the performances of BPD area judged insufficient doe the existence of the Village Regulations has not been made in addition to BPD about conduct BPD as well as the aspirations of less villagers follow up by BPD. This research uses descriptive kind of research with qualitative research methods. The data was collect by using techniques of observation, interview dan documentation. The location of this research is in the Tumuk Manggis Village, Sambas sub-district, Sambas regency. The indicators that uses to measure the performances of BPD is, Responsiveness, Responsibility and Accountability according by Moehariono. The conclusions of this research is the BPD of Tumuk Manggis Village have not been fullest in carrying out the duties dan functions duo to lack of understanding of the mechanism of composing the village regulations.

Keywords : Performance of BPD, Village Regulations, the community's aspirations.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini tentu memberikan peluang kepada daerah untuk lebih mengembangkan potensi yang ada pada daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh mitra desa yaitu Lembaga Pemberdayaa Masyarakat Desa (LPMD) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan

Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang diangkat dari tokoh masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 55 dijelaskan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi merumuskan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkenaan dengan materi peraturan desa, serta mengawasi kinerja kepala desa.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan pada saat melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPK) beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, penulis menemukan fenomena mengenai BPD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jika

dilihat dari tugas dan fungsi BPD, salah satunya yaitu membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dapat diketahui bahwa BPD yang ada di Desa Tumuk Manggis belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peraturan yang dibuat BPD selama periode masa kerja 2010-2016 hanya ada 1 (satu) peraturan saja yaitu tata tertib BPD. Peraturan mengenai tata tertib BPD tersebut merupakan peraturan yang wajib untuk dibuat sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BPD itu sendiri.

Kemudian jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, BPD juga masih belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya aspirasi masyarakat desa yang belum terealisasi, dikarenakan kurang aktifnya BPD melakukan pertemuan atau rapat yang melibatkan masyarakat baik di tingkat dusun maupun desa. Rapat diadakan di rumah ketua BPD dikarenakan belum adanya ruang rapat yang disediakan oleh desa, dan terkadang rapat juga diadakan bergantian di rumah ketua dan anggota BPD itu sendiri. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa, BPD melibatkan masyarakat untuk menyalurkan dan menyampaikan aspirasinya dalam rapat-rapat tertentu yang sifatnya menyangkut kepentingan desa, sehingga aspirasi

masyarakat hanya sekedar ditampung tetapi direalisasikan.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja BPD sebagai badan legislasi dalam merumuskan peraturan desa di Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas”.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Responsivitas BPD di Desa Tumuk Manggis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Responsibilitas BPD di Desa Tumuk Manggis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas BPD di Desa Tumuk Manggis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pemahaman berkaitan dengan ilmu pemerintahan terutama berkaitan dengan masalah kinerja BPD dalam merumuskan peraturan desa bersama kepala desa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Kantor Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan dalam rangka meningkatkan kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Bagi peneliti bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kantor Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.
- 3) Bagi fakultas bermanfaat dalam memperkaya bahan referensi ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan pada khususnya dan Ilmu Sosial pada umumnya.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a. Otonomi Desa

Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri dan *nomos* yang berarti hukuman atau aturan/ undang-undang. Menurut Soetardjo, sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholis, (2011:21), menjelaskan bahwa pada awalnya rumah tangga desa sangat luas karena desa untuk pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompok-kelompok penduduk baik berdasarkan genealogis maupun territorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relatif bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat. Cakupan meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohanian, tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan.

Otonomi desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara

tradisional. Desa seperti itu disebut dengan desa yang mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan (Nucholis, 2011:19).

b. Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performances* yang sering diartikan hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan. Kinerja juga dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Amstrong dan Baron, sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo, (2013:2) bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Menurut Wibowo (2007:7) kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat dipahami bahwa

kinerja tidak hanya membahas mengenai pekerjaan yang dilakukan tetapi juga melihat hasil dari kerjanya, serta tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut.

c. Indikator Kinerja Organisasi

Menurut Hersey, sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo, (2013:106), kinerja organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia.

Moehariono (2012:162) menjelaskan bahwa, ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu :

- a. Responsivitas (*Responsiveness*), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Responsibilitas (*Responsibility*), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.

- c. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

2. Metodologi

Penelitian dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Moelong (2011:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti menggambarkan fakta yang terjadi sebagaimana realitas alami tanpa adanya fenomena-fenomena yang dibuat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Responsivitas

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat peneliti pahami, bahwa BPD Tumuk Manggis belum mampu menyerap aspirasi masyarakat desa dan disalurkan dalam bentuk Peraturan Desa.

BPD juga dinilai kurang aktif dalam mengadakan kegiatan maupun rapat yang melibatkan masyarakat desa, sehingga masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya.

2. Responsibilita

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat peneliti pahami bahwa sebagian anggota BPD Tumuk Manggis belum memahami tugas dan fungsinya, sehingga mereka kesulitan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. BPD Tumuk Manggis juga belum memahami mekanisme secara administrasi perumusan Peraturan Desa, sehingga belum mampu untuk membuat rancangan Peraturan Desa yang terbaru. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari BPD itu sendiri serta kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan tentang prosedur perumusan Peraturan Desa. Berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa juga ditingkatkan sehingga dalam hal perumusan Peraturan Desa serta pengawasan Kinerja Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Akuntabilitas

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa yang terjadi di Desa Tumuk Manggis adalah

BPD kurang memiliki inisiatif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah masyarakat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini berakibat pada penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa kinerja BPD selama ini masih rendah. Padahal sudah menjadi tanggung jawab BPD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, untuk selanjutnya dibuat rancangan Peraturan Desa kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disetujui bersama. BPD juga masih memiliki kelemahan dalam hal administrasi seperti mekanisme penyusunan Peraturan Desa, laporan pertanggungjawaban BPD, agenda kegiatan BPD serta agenda surat masuk dan keluar yang masih belum teratur. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara BPD dan Kepala Desa juga menjadi hambatan dalam menyusun agenda rancangan Peraturan Desa, padahal apabila dapat terjalin koordinasi yang baik antara kedua belah pihak, akan lebih mudah untuk menentukan agenda yang dianggap penting untuk dijadikan rancangan Peraturan Desa.

D. SIMPULAN

1. Kinerja BPD di Desa Tumuk Manggis dikaji dari responsivitas. BPD Tumuk

Manggis memang sudah berusaha menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Namun dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal, dilihat dari belum ada tindak lanjut dari BPD terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa. BPD juga kurang aktif dan tanggap dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi pada masyarakat yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BPD. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa responsivitas BPD di Desa Tumuk Manggis masih rendah.

2. Kinerja BPD di Desa Tumuk Manggis dikaji dari responsibilitas. Berdasarkan indikator responsibilitas, peneliti menyimpulkan bahwa responsibilitas BPD Tumuk Manggis masih rendah, dikarenakan BPD bersama Pemerintah Desa belum mampu merumuskan Peraturan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman BPD tentang mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Tidak adanya sosialisasi

maupun pelatihan yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga BPD dalam menyusun Peraturan Desa hanya mengandalkan pengetahuan dari internet. Akibatnya sampai saat ini BPD Tumuk Manggis belum memiliki Peraturan Desa selain Peraturan tentang Tata Tertib BPD.

3. Kinerja BPD di Desa Tumuk Manggis dikaji dari Akuntabilitas Pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Tumuk Manggis sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan fenomena bahwa BPD belum mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa, padahal banyak agenda yang perlu dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang menjadi tanggung jawab BPD untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa masih belum optimal. Sehingga dapat peneliti pahami bahwa pertanggungjawaban BPD atas tugas dan fungsinya belum optimal.

E. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada BPD Tumuk Manggis serta Pemerintah Desa Tumuk Manggis khususnya dalam meningkatkan kinerja BPD Tumuk Manggis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada BPD Tumuk Manggis untuk lebih tanggap dalam mendengar aspirasi/kebutuhan masyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut dapat terealisasi dalam bentuk Peraturan Desa. Misalnya dengan mengadakan rapat bersama masyarakat dan Pemerintah Desa sehingga akan didapat kesepakatan antara BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman BPD mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa menyebabkan kurang terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Untuk itu, sangat perlunya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan kepada BPD mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

3. Perlunya untuk meningkatkan koordinasi, baik koordinasi antar sesama anggota BPD maupun koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa maupun BPD dengan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat maupun apa yang menjadi kendala BPD dalam melaksanakan fungsinya dapat dijadikan ditingkatkan kedepannya.
4. Untuk memudahkan BPD dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPD, sebaiknya dilakukan inovasi dalam penyampaian aspirasi ataupun kritikan dari masyarakat. Misalnya dengan membuat Kotak Kritik dan Saran yang diletakkan pada setiap Pos Kamling sehingga semua masyarakat dapat menyampaikan kritik dan sarannya kepada BPD dan Pemerintah Desa.

F. KETERBATASAN

Selama melakukan penelitian tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena peneliti masih tergolong baru dan pemula

dalam melakukan penelitian ilmiah. Peneliti berharap dengan keterbatasan penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti yang lain. Adapun beberapa keterbatasan penelitian yang peneliti alami adalah sebagai berikut :

1. Dokumen dan Buku. Sulitnya mendapatkan dokumen seperti profil desa yang masih belum lengkap serta masih berbentuk angka dan tabel dikarenakan Kantor Desa yang masih dalam tahap renovasi, sehingga menyulitkan peneliti dalam membuat deskripsi wilayah, serta minimnya referensi buku-buku yang berkaitan dengan kinerja BPD menjadi salah satu keterbatasan peneliti dalam penelitian ini.
2. Wawancara dan mengolah data. Sulitnya peneliti untuk bertemu dengan anggota BPD dikarenakan mereka memiliki pekerjaan utama selain menjadi anggota BPD. Kemudian peneliti masih belum mampu mengembangkan isi wawancara dengan baik dikarenakan peneliti yang merupakan pemula sehingga sedikit menyulitkan peneliti dalam melakukan wawancara.
3. Sebagian dari informan menolak untuk diwawancarai serta ada

beberapa informan yang kurang responsif dalam melakukan wawancara sehingga membuat peneliti harus lebih giat lagi dalam melakukan wawancara untuk menggali informasi.

4. Waktu penelitian yang sangat terbatas. Waktu penelitian yang diberikan selama 12 (dua belas) hari oleh pihak pengelola, dirasakan kurang bagi peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

G. APRESIASI

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pengasuh, Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tumuk Manggis yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.

H. REFERENSI

1. Buku-buku :

Dwiyanto, Agus, dkk.
2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008.

LAN dan BPKP, Modul I.
2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*.

Mardiasmo.
2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sasaran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2.

Moheriono.
2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Jakarta : Rajawali Pers.

Moleong, Lexy.
2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.

Nurcholis Hanif.
2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Pasalong, Harbani.
2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif)*. Bandung : Fokusmedia.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi, Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.

Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia.

Tangkilisan, Hassel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo, anggota IKAPI.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Bandar Maju.

Pengelola dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak. Prodi IP UNTAN.

Umam, Khaerul. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Pers.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Jawa Timur : Banyumedia Publishing.

2. Skripsi :

Hadiansyah, Nurul. 2013. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat*

di Desa Sayang Sedayu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura.

Nuzulita, Suci. 2015. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas*. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura.

3. Dokumen-dokumen :

Data Monografi Desa Tumuk Manggis Tahun 2015 Profil Desa Tumuk Manggis

4. Peraturan-peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Nomoe 01 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

5. Rujukan Elektronik

<http://mohmahsun.blogspot.co.id/2011/04/akuntabilitas-kinerja.html> (diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 23.00 WIB).

<http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html> (diakses

pada tanggal 5 Desember 2016,
pukul 23.05 WIB).





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Uray Dani Adhani
NIM / Periode Lulus : E42012016 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : d.uray@yahoo.co.id / 085787385542

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DFSA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DI DESA TUMUK MANGGIS KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

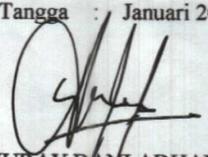
Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/dijetujui
Pengelola Jurnal IP

KERJASAMA
FISIP UNTAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A.
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Januari 2017


(URAY DANI ADHANI)